

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.012/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BAGIAN
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2019

RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga

dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mulai dilakukan setelah surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 050.13/601/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Sebelum dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 berdasarkan surat undangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 005/1052/35.07.202/2018. Kemudian tindak lanjut Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini, dengan melaksanakan penyusunan Rancangan

Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang Tahun 2019 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 050.13/1835/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai hasil verifikasi. Rancangan Renja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sedangkan Pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Agustus 2018 Nomor : 050.13/5072/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan

memperhatikan proses penyusunan yang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2019.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

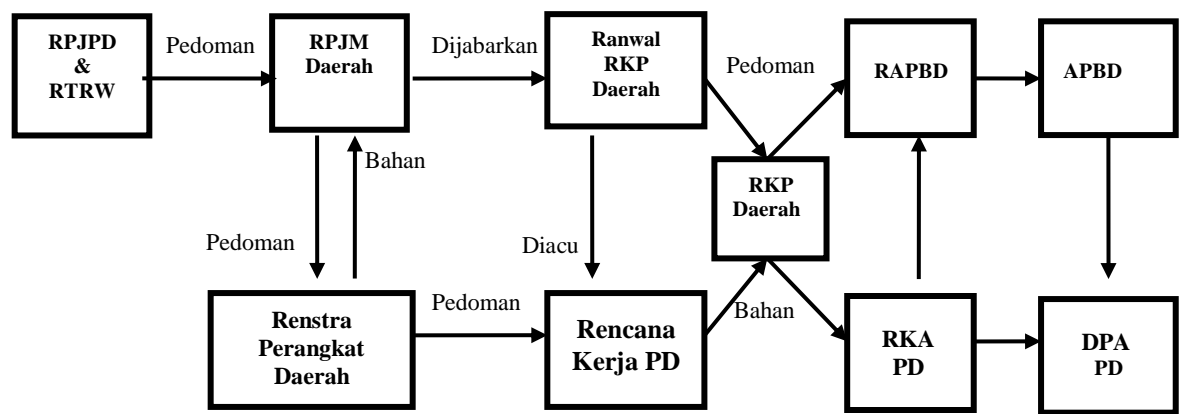
Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya

mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berpedoman pada :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 570 / KEP / 35.07.013 / 2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
3. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Malang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Malang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkatkan yang lebih tinggi;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 11 program dan 22 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program kegiatan tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 98,59 %.

Tahun 2018 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Terdapat program baru yang dialokasikan sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang memiliki 3 kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Pembinaan Sosial;
 - b. Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan.

Tingkat capaian target kinerja program kegiatan yang Tahun 2018 diperkirakan dapat terealisasi 90%. Capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tribulan II tahun 2018 diharapkan sebesar 30%. Evaluasi pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan

prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Pada program ini dengan 10 (sepuluh) kegiatan, untuk 8 (delapan) kegiatan telah tercapai 100% namun untuk 2 (dua) kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya tercapai 4,69 % dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah tercapai 99,96%.

Hambatan tidak tercapainya kegiatan ini adalah :

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Kebutuhan barang Adf cover Foto Copy yang dibutuhkan belum ada di pasaran.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah telah sesuai dengan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Solusi untuk kegiatan adalah :

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor melaksanakan survey barang dan memastikan barang ada sebelum perencanaan dan penganggaran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dapat tercapai 98,99% dan untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dapat tercapai 88,40%.

Hambatan untuk kegiatan yang tidak tercapai adalah :

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor telah sesuai dengan kebutuhan kegiatan dimaksud.

Solusi untuk kegiatan adalah :

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor lebih direncanakan dan menjadi koreksi untuk perencanaan dan penganggaran di tahun yang akan datang.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini ditujukan bagi karyawan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan guna ketertiban dan kerapian bagi karyawan dalam berpakaian dan meningkatkan disiplin seluruh karyawan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya.

Program ini ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memberikan pelatihan/keterampilan berusaha bagi penyandang

masalah sosial di wilayah Kabupaten Malang. Sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan taraf penghidupan yang lebih baik.

Kegiatan Bimbingan Motivasi, Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kegiatan Bimbingan Motivasi Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin/Prasejahtera di wilayah Kabupaten Malang, diwujudkan dalam bentuk memberikan pelatihan sesuai dengan keahlian/skill, kondisi masyarakat yang bersangkutan, hal ini juga dapat membantu memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan promosi produk hasil desa/kecamatan. Yang dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 99,65%.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. Melibatkan peserta dari lanjut usia di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini bertujuan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang ingin mewujudkan kesejahteraan lanjut usia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat (sosialisasi dan pemberdayaan lanjut usia) yang diselenggarakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017. Yang dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program pengembangan lingkungan sehat ditujukan untuk kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit Demam Berdarah di wilayah Kabupaten Malang Tahun 2017. Penyusunan menciptakan lingkungan sehat melaksanakan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja 100 %.

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dilaksanakan dengan tujuan memberikan wawasan bagi remaja (usia sekolah) di wilayah Kabupaten Malang. Remaja mempunyai sifat dan karakter yang

serba ingin tahu, mencoba hal-hal yang baru, kurang dapat berperilaku dan belum punya pengendalian diri yang baik. Remaja perlu mengetahui pendidikan kesehatan agar dapat bersikap dan bertanggung jawab terhadap kesehatan.

Oleh sebab itu sebagai upaya memberikan sosialisasi bagi remaja maka dilaksanakan kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. Kegiatan ini diharapkan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja 99,11 %.

9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan rapat koordinasi UKS dan rapat pembinaan UKS. Tujuan peningkatan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperbaiki dan memulihkan kesehatan masyarakat sekolah.

Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dilaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja 99,57%.

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi peraturan perundang-undangan. Kegiatan fasilitasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan tujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peraturan bantuan sosial dan sosialisasi bahaya narkoba dan bahaya pergaulan bebas bagi remaja/pemuda. Hal ini diupayakan supaya masyarakat maupun SKPD terkait saling menunjang sekaligus bekerjasama mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang siap akan perubahan dan lebih maju untuk memiliki sikap dan perilaku hidup yang lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu sebagai upaya inovasi dan mewujudkan kemajuan masyarakat yang lebih baik dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Kegiatan ini diharapkan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja 100%.

11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, bertujuan memberikan bimbingan motivasi bagi masyarakat (ibu rumah tangga/remaja putri/wanita produktif/mantan tenaga kerja wanita) untuk hidup mandiri, kreatif dan inovatif memiliki jiwa wirausaha.

Melalui bimbingan motivasi masyarakat lebih memiliki wawasan dan pengetahuan akan pentingnya bimot dan pelatihan supaya menjadi masyarakat yang mandiri dan memiliki jiwa wirausaha yang lebih berani mengembangkan bakat/talenta yang dimiliki masing-masing individu. Oleh sebab itu sebagai upaya memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan/skill bagi masyarakat dilaksanakan bimbingan motivasi/pelatihan yang diharapkan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja 99,87%.

Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* (*pemangku kepentingan*) pembangunan lainnya.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Adapun pada Tabel 2.1 di bawah tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, diketahui bahwa pada perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (kolom 10 & 11*) pada dasarnya program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan pada 15 Agustus 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/283/KEP/35.07.012/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, hanya saja perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (kolom 10 & 11*) kurang terukur maksimal karena ada beberapa capaian kinerjanya tidak dapat diakumulasi/dihitung keseluruhan dalam periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, hal ini disebabkan karena pada Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016 (kolom 5) yang merupakan tahun awal periode Renstra Perangkat Daerah terdapat beberapa perbedaan/penyesuaian baik nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir. Bahwasanya pada Tahun 2016 secara keseluruhan rata-rata program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang

terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 11 November 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/ /KEP/35.07.012/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Uraian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 terlihat pada **tabel 2.1** sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bagian Adm.Kesra Tahun 2016 s.d. 2021 (akhir periode Renstra Bagian Adm. Kesra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun 2018)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan: Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang: Fungsi Lainnya									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	4.300 buah	12 bulan	1000 surat	1000 surat	1,00	1000 buah	1000 buah	23,25
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	24 OB	12 bulan	15 OB	15 OB	1,00	24 OB	24 OB	100
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	9 jenis	12 bulan	9 jenis	9 jenis	1,00	9 jenis	9 jenis	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	132 OB	12 bulan	132 OB	132 OB	1,00	132 OB	132 OB	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 jenis	12 bulan	25 jenis	25 jenis	1,00	25 jenis	25 jenis	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bagian Adm.Kesra Tahun 2016 s.d. 2021 (akhir periode Renstra Bagian Adm. Kesra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun 2018)		
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	582.524 lembar	12 bulan	166680 lembar	166680 lembar	1,00	117297 lembar	117297 lembar	20	*)
		Jumlah barang cetakan yang disediakan	3 jenis	12 bulan	2 jenis	2 jenis	1,00	3 jenis	3 jenis	100	*)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	4 jenis	12 bulan	4 jenis	4 jenis	1,00	4 jenis	4 jenis	100	*)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	5 unit	2 unit	1 unit	0,50	3 unit	3 unit	100	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	12 bulan	1 jenis	1 jenis	1,00	1 jenis	1 jenis	100	*)
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi dinas ke dalam daerah	251 HOK	12 bulan	251 OHK	251 OHK	1,00	251 HOK	251 HOK	100	*)
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	114 HOK	12 bulan	34 OHK	34 OHK	1,00	114 HOK	114 HOK	100	*)
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3360 HOK	-	-	-	-	3360 HOK	3360 HOK	100	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bagian Adm.Kesra Tahun 2016 s.d. 2021 (akhir periode Renstra Bagian Adm. Kesra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun 2018)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	0,98	3 unit	3 unit	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipeliharaan	3 jenis	12 bulan	3 jenis	3 jenis	0,88	3 jenis	3 jenis	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	11 potong	11 potong	11 stel	11 stel	1,00	11 potong	11 potong	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen renstra, laporan tahunan, laporan kinerja, dokumen renja, dokumen saki	14 buku	12 bulan	100%	100%	1,00	14 buku	14 buku	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	4 buku	-	-	-	-	4 buku	4 buku	100

*)

*)

*)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bagian Adm.Kesra Tahun 2016 s.d. 2021 (akhir periode Renstra Bagian Adm. Kesra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun 2018)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
V	Program Pemberayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase peningkatan pemberdayaan prasejahtera dan PMKS	100 %	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin	2460 orang	360 orang	3 kali	3 kali	1,00	-	-	-
2	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah sosial	Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah sosial	3100 orang	450 orang	4 kali	4 kali	1,00	-	-	-
VI	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan sosial	7450 orang	1.200 orang	1 kali	1 kali	1,00	-	-	-
VII	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	6470 orang	670 orang	36 kali	36 kali	1,00	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bagian Adm.Kesra Tahun 2016 s.d. 2021 (akhir periode Renstra Bagian Adm. Kesra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun 2018)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
VIII	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah fasilitasi sosialisasi pola hidup sehat	4300 orang	700 orang	1 kali	1 kali	1,00	-	-	-
IX	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase peningkatan pengembangan lingkungan sehat	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah fasilitasi sosialisasi menciptakan lingkungan sehat	0	400 orang	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah fasilitasi sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	2260 orang	1.400 orang	6 kali	6 kali	1,00	-	-	-
X	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan sosialisasi kesempatan kerja	100 %	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah fasilitasi sosialisasi bagi pencari kerja	4850 orang	600 orang	4 kali	4 kali	1,00	-	-	-
XI	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peningkatan sosialisasi peraturan	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-
1	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan	2810 orang	400 orang	4 kali	4 kali	1,00	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bagian Adm.Kesra Tahun 2016 s.d. 2021 (akhir periode Renstra Bagian Adm. Kesra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun 2018)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
XII	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	25%	-	-	-	-	25%	25%	100
1.	Fasilitasi Pembinaan Sosial	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	2 kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100
2.	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	2 kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100
3.	Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100

) Capaian realisasi target Renstra s/d Tahun 2018 untuk kegiatan bertanda () tidak dapat dihitung karena adanya perbedaan target kinerja pada tahun 2016, sehingga angka capaian yang ada hanya dihitung dari realisasi capaian target Tahun 2017 dan perkiraan capaian target Tahun 2018 saja.

Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada program dan kegiatan masih menggunakan rencana strategi yang lama. Sehingga untuk mengukur tingkat capaian tidak dapat dihitung karena perubahan dan perbedaan indikator kinerja dan satuan target kinerja. Sedangkan tahun 2018 telah menyesuaikan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di bidang sosial, kesehatan masyarakat, dan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait, terutama dalam penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya bidang sosial, kesehatan masyarakat, dan ketenagakerjaan.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tercantum pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

[illegible]

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Program dan Kegiatan												
I.	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	-	-	1000 buah	1000 buah	1000 buah	1000 buah	12 bulan	1000 buah	1000 buah	1000 buah	
2.	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	-	-	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	12 bulan	132 OB	132 OB	132 OB	
3.	Jumlah Petugas Kebersihan	-	-	12 OB	24 OB	24 OB	24 OB	12 bulan	12 OB	24 OB	24 OB	
4.	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	-	-	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	12 bulan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	
5.	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	12 bulan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	
6.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	-	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	12 bulan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
7.	Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	-	-	117297 lembar	117297 lembar	117297 lembar	117297 lembar	12 bulan	117297 lembar	117297 lembar	117297 lembar	
8.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	-	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	12 bulan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
9.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	12 bulan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
10.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
11.	Jumlah pegawai memenuhi dinas ke dalam daerah	-	-	251 HOK	251 HOK	251 HOK	251 HOK	12 bulan	251 HOK	251 HOK	251 HOK	
12.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	-	-	114 HOK	114 HOK	114 HOK	114 HOK	12 bulan	114 HOK	114 HOK	114 HOK	
13.	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	-	-	-	3360 HOK	3360 HOK	3360 HOK	-	-	3360 HOK	3360 HOK	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berfungsi baik (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	-	-	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
15.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	12 bulan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
III.	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)	-	-	11 stel	12 stel	12 stel	12 stel	11 potong	11 stel	12 stel	12 stel	
IV.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Jumlah dokumen renstra, laporan tahunan, laporan kinerja, dokumen renja, dokumen saki	-	-	2 Buku	14 Buku	14 Buku	14 Buku	12 bulan	2 Buku	14 Buku	14 Buku	
18.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	-	4 buku	4 buku	4 buku	-	-	4 buku	4 buku	
V.	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	
19.	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	23 OKB/OKH	23 OKB/OKH	-	-	23 OKB/OKH	23 OKB/OKH	Penambahan Program dan Kegiatan Tahun 2019

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI.	Persentase peningkatan pemberdayaan prasejahtera dan PMKS	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	
1.	Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin	-	-	3 kali	-	-	-	3 kali	-	-	-	
2.	Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah sosial	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	
VII.	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	
1.	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan sosial	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	
VIII.	Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	
1.	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	-	-	36 kali	-	-	-	36 kali	-	-	-	
IX.	Persentase peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	
1.	Jumlah fasilitasi sosialisasi pola hidup sehat	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	
X.	Persentase peningkatan pengembangan lingkungan sehat	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah fasilitasi sosialisasi menciptakan lingkungan sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Jumlah fasilitasi sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	-	-	6 kali	-	-	-	6 kali	-	-	-	
XI.	Persentase peningkatan sosialisasi kesempatan kerja	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	
1.	Jumlah fasilitasi sosialisasi bagi pencari kerja	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	
XII.	Persentase pelaksanaan peningkatan sosialisasi kesempatan kerja	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	
1.	Jumlah fasilitasi sosialisasi peraturan	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	
XIII .	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	-	-	-	75%	90%	90%	-	75%	90%	90%	
1.	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	
2.	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	
3.	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dalam ketentuan pasal 15 disebutkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang ketenagakerjaan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sedangkan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan; dan
- c. Pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang **MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”**, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berperan

mendukung misi ke-2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kesejahteraan rakyat, pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan, pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memberikan fasilitasi dan berkoordinasi dengan dinas teknis/pelaksana atau operating core serta melakukan pembinaan/sosialisasi/bimbingan motivasi terhadap masyarakat yang antara lain yaitu :

- a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Malang melalui sosialisasi, bimbingan motivasi dan pembinaan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, merubah pola pikir. Hal itu dapat diwujudkan dengan pengembangan diri melalui wirausaha yang dapat bermanfaat untuk merubah dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta sosialisasi perlindungan pekerja melalui sosialisasi perlindungan bagi pekerja dan keluarga pekerja;
- b. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Malang melalui sosialisasi, bimbingan motivasi dan pembinaan yang terkait dengan permasalahan sosial serta resiko sosial lainnya;
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Malang melalui sosialisasi, pembinaan dan bimbingan motivasi yang terkait dengan kesehatan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Merujuk pada kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang sosial, bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang ketenagakerjaan, maka Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dihadapkan pada isu strategis yaitu masih kurang optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi fasilitasi pembinaan sosial, fasilitasi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terlihat pada tabel 2.3, sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	393.006.831	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	277.160.000	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	25.954.500	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	18.304.000	
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	132 OB	64.606.740	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	132 OB	45.563.000	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	18.000.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	12.694.000	
			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	9 jenis	5.317.750			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	9 Jenis	3.750.000	
	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	4 jenis	1.515.743	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	4 Jenis	1.069.000	
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	3 unit	89.006.699	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	62.770.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Penyediaan Alat tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	25 jenis	21.832.460	6. Penyediaan Alat tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	15.397.000	
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	2.970.792	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.095.000	
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	3 jenis	10.630.000	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	7.497.000	
			Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	117.297 lembar	23.107.922			Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	117.297 Lembar	16.296.000	
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas luar daerah (HOK)	114 HOK	43.257.500	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	114 HOK	30.506.000	
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	251 HOK	53.206.725	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	251 HOK	37.523.000	
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3360 HOK	33.600.000	11. Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3360 HOK	23.696.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	55.976.137	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Adminis trasi Kesejah teraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berfungsi baik (%)	100%	39.476.000	
	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	3 unit	36.054.261	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	3 unit	25.427.000	
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	3 jenis	19.921.876	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	3 Jenis	14.049.000	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	6.465.466	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bagian Adminis trasi Kesejah teraan Rakyat	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	4.560.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	12 stel	6.465.466	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	12 stel	4.560.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	79.565.256	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Bagian Adminis trasi Kesejah teraan Rakyat	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	56.112.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Renstra (buku)	2 buku	7.205.971	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Renstra (buku)	2 buku	5.082.000	
			Jumlah Laporan Tahunan (buku)	4 buku	14.411.943			Jumlah Laporan Tahunan (buku)	4 buku	10.164.000	
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulan (I s/d III) (buku)	3 buku	21.617.914			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulan (I s/d III) (buku)	3 buku	15.246.000	
			Jumlah dokumen Renja (buku)	2 buku	7.205.971			Jumlah dokumen Renja (buku)	2 buku	5.082.000	
			Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	3 buku	10.808.957			Jumlah dokumen SAKIP (buku)	3 buku	7.623.000	
	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	4 buku	18.314.500	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	4 buku	12.916.000	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3.068.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	23 OKB/ OKH	-	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	23 OKB/ OKH	3.068.000	Tambahan ajuan perubahan renstra
6.	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	25%	876.555.500	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	25%	876.555.500	
	1. Fasilitasi Pembinaan Sosial		Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	2 kegiatan	460.000.000	1. Fasilitasi Pembinaan Sosial		Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	2 kegiatan	324.404.500	Kegiatan responsive gender
	2. Fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	2 kegiatan	482.938.200	2. Fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	2 kegiatan	340.582.000	Kegiatan responsive gender
	3. Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan		Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	1 kegiatan	300.000.000	3. Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan		Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	1 kegiatan	211.569.000	Kegiatan responsive gender
JUMLAH					1.777.951.890	JUMLAH				1.256.932.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah fungsi lainnya, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Malang adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang adil dan makmur materila dan spiritual di atas dasar kesucian yang langgeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai indikator sasaran pembangunan Kabupaten Malang dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera antara lain : a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan rata-rata 6,5% pertahun sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara berpenghasilan menengah. Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka rata-rata 2% pertahun; b) terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang tangguh dan berdaya saing, c) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang; d) Pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang, penurunan angka kemiskinan, pengembangan lapangan kerja yan bersifat partisipasif dan padat karya serta peningkatan kualitas angkatan kerja; e) Peningkatan kualitas layanan publik bidang kesehatan seperti pengembangan puskesmas di kawasan pedesaan dan tidak hanya terpusat di ibu kota kecamatan, pengembangan puskesmas yang ideal d setiap kecamatan yang bisa melayani rawat inap, serta rumah sakit di setiap satuan wilayah pengembangan (SSWP); f) Pengembangan layanan publik dengan konsep satu atap dan trnasformasi secara bertahap ke era pelayanan digital. Pengembangan layanan publik dengan konsep satu atap sentralisasi yang ditunjang dengan Teknoogi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) menuju pelayanan publik terdesentralisasi yang sudah menyentuh ke pelosok desa (*digital village*) baik pelayanan perijinan, kesehatan, pendidikan maupun

sistem birokrasi (*e-government*); g) Terintegrasinya infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam sistem portal jaringan pemerintah Kabupaten Malang; h) Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Daerah.

Sebagai tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata Dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Daya Dukung”**.

Selanjutnya dari fokus pembangunan tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun

2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarustamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja program adalah :

1. Persentase pemenuhan operasional perkantoran;
2. Persentase penunjang kerja aparatur;
3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur;
4. Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu;
5. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah;
6. Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat.

Adapun program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang yang mendukung program responsive gender sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Sosial

Kegiatan fasilitasi ini dilakukan melalui pembinaan / sosialisasi / bimbingan motivasi / sarasehan / monev untuk bidang sosial

b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan fasilitasi dilakukan melalui pembinaan / sosialisasi / bimbingan motivasi / sarasehan / monev untuk bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan

Kegiatan fasilitasi dilakukan melalui pembinaan / sosialisasi / bimbingan motivasi / sarasehan / monev untuk bidang ketenagakerjaan.

Lokasi kegiatan adalah di Wilayah Kabupaten Malang. Dan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp. 1.256.932.000,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Dengan sumber dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 **tabel 3.1** sebagai mana terlampir.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretarat Daerah Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Lainnnya									
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kab. Malang	100%	277.160.000	PAD		100%	431.147.513	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	1000 buah	18.304.000	PAD		1000 buah	28.549.950	
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	132 OB	45.563.000	PAD		132 OB	71.067.414	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab. Malang	24 OB	12.694.000	PAD		24 OB	18.000.000	
		Jumlah peralatan/ bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)		9 Jenis	3.750.000	PAD		9 Jenis	9.849.525	
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	25 Jenis	15.397.000	PAD		25 Jenis	24.015.706	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malang	3 unit	62.770.000	PAD		3 unit	97.907.368	
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	7.497.000	PAD		3 Jenis	10.630.000	
		Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	Kab. Malang	117.297 lembar	16.296.000	PAD		117.297 lembar	26.481.714	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kab. Malang	4 Jenis	1.069.000	PAD		4 Jenis	1.667.317	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	2.095.000	PAD		1 Jenis	3.267.871	
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	114 HOK	30.506.000	PAD		114 HOK	47.583.250	
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	251 HOK	37.523.000	PAD		251 HOK	58.527.398	
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab. Malang	3360 HOK	23.696.000	PAD		3360 HOK	33.600.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	39.476.000	PAD		100%	61.573.750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	Kab. Malang	3 unit	25.427.000	PAD		3 unit	39.659.687	
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 jenis	14.049.000	PAD		3 jenis	21.914.063	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	4.560.000	PAD		100%	7.112.012	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian dinas (Stel)	Kab. Malang	12 stel	4.560.000	PAD		12 stel	7.112.012	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kab. Malang	100%	56.112.000	PAD		100%	85.690.334	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen renstra (buku)	Kab. Malang	2 Buku	5.082.000	PAD		2 Buku	7.926.569	
		Jumlah laporan tahunan (buku)	Kab. Malang	4 Buku	10.164.000	PAD		4 Buku	15.853.137	
		Jumlah laporan kinerja SKPD Triwulan (I s/d III) (buku)	Kab. Malang	3 Buku	15.246.000	PAD		3 Buku	23.779.706	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen renja (buku)	Kab. Malang	2 Buku	5.082.000	PAD		2 Buku	7.926.569	
		Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	Kab. Malang	3 Buku	7.623.000	PAD		3 Buku	11.889.853	
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku)	Kab. Malang	4 Buku	12.916.000	PAD		4 Buku	18.314.500	
	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	Kab. Malang	25%	876.555.500	PAD		100%	1.401.432.700	
	1. Fasilitasi Pembinaan Sosial	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	Kab. Malang	2 kegiatan	324.404.500	PAD		2 kegiatan	500.000.000	Kegiatan Responsive Gender
	2. Fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	Kab. Malang	2 kegiatan	340.582.000	PAD		2 kegiatan	551.432.700	Kegiatan Responsive Gender
	3. Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	Kab. Malang	1 kegiatan	211.569.000	PAD		1 keg	350.000.000	Kegiatan Responsive Gender
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	Kab. Malang	100%	3.068.000	PAD		100%	4.350.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	Kab. Malang	23 OKB/OKH	3.068.000	PAD		23 OKB/OKH	4.350.000	Penambahan Program dan Kegiatan Tahun 2019
JUMLAH					1.256.932.000				1.991.306.309	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen rencana kerja sebagai acuan bagi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana program dan kegiatan, rencana kerja Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai instrumen pelaksana dari program Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan

urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Program dan kegiatan Tahun 2019 dalam Rencana Kerja pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang antara lain :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	FUNGSI LAINNYA					
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kab. Malang	100%	277.160.000	PAD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	1000 buah	18.304.000	PAD
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	132 OB	45.563.000	PAD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab. Malang	24 OB	12.694.000	PAD
		Jumlah peralatan/ bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)		9 Jenis	3.750.000	PAD
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	25 Jenis	15.397.000	PAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malang	3 unit	62.770.000	PAD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	7.497.000	PAD
		Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	Kab. Malang	117.297 lembar	16.296.000	PAD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kab. Malang	4 Jenis	1.069.000	PAD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	2.095.000	PAD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	114 HOK	30.506.000	PAD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	251 HOK	37.523.000	PAD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab. Malang	3360 HOK	23.696.000	PAD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	39.476.000	PAD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	Kab. Malang	3 unit	25.427.000	PAD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 jenis	14.049.000	PAD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	4.560.000	PAD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian dinas (Stel)	Kab. Malang	12 stel	4.560.000	PAD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kab. Malang	100%	56.112.000	PAD
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen renstra (buku)	Kab. Malang	2 Buku	5.082.000	PAD
		Jumlah laporan tahunan (buku)	Kab. Malang	4 Buku	10.164.000	PAD
		Jumlah laporan kinerja SKPD Triwulan (I s/d III) (buku)	Kab. Malang	3 Buku	15.246.000	PAD
		Jumlah dokumen renja (buku)	Kab. Malang	2 Buku	5.082.000	PAD
		Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	Kab. Malang	3 Buku	7.623.000	PAD
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku)	Kab. Malang	4 Buku	12.916.000	PAD
	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	Kab. Malang	25%	876.555.500	PAD
	Fasilitasi Pembinaan Sosial	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	Kab. Malang	2 kegiatan	324.404.500	PAD
	Fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	Kab. Malang	2 kegiatan	340.582.000	PAD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	Kab. Malang	1 kegiatan	211.569.000	PAD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	Kab. Malang	100%	3.068.000	PAD
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	Kab. Malang	23 OKB/OKH	3.068.000	PAD
	JUMLAH				1.256.932.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Rancangan Renja – SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka – angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat secara konsisten dan bertanggung jawab.

Sedangkan Rencana kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Serta didasarkan dari lintas program dan usulan masyarakat melalui penyusunan program yang transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA